

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH,  
PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, MOTIVASI KERJA, DAN  
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

**ABSTRAKSI**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilakukan pada 47 Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survey. Pengumpulan data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner (mail questionnaire) kepada responden kepala satuan kerja, bagian keuangan, dan bagian perencanaan/program.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Motivasi Kerja menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketaatan pada Peraturan Perundangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan nilai R square sebesar 0.142 yang berarti 14.2% variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel dependen.*

**Kata Kunci :** *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

*Good governance* menjadi hal utama yang harus diperhatikan, perkembangan lingkungan strategik nasional dan internasional yang kita hadapi dewasa ini dan di masa yang akan datang, menuntut perubahan paradigma pemerintahan dan pembaharuan sistem kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta dalam hubungan antar bangsa. Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pemerintah telah menerbitkan suatu paket perundangan di bidang keuangan negara sekaligus sebagai landasan hukum bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan. Disamping itu pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Good governance* sendiri dilandasi oleh tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi keuangan dan partisipasi publik. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan dukungan SDM yang berkualitas. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja suatu instansi. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian Soleman (2007) yang meneliti mengenai kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah maka akan berpengaruh pada penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara baik dan memadai. Sedangkan penelitian penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di kabupaten dan kota non pemekaran di Provinsi Maluku Utara dilakukan Soleman (2007), Penerapan akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Narmodo dan Wajdi (2006) penelitiannya tentang Motivasi kerja juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sedangkan penelitian mengenai ketaatan pada peraturan perundangan dilakukan oleh Soleman (2007). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melihat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah, yaitu : Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah, Penerapan akuntabilitas keuangan, Motivasi kerja dan Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang signifikansi hubungan antara variabel Independen dan dependen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur akuntansi sektor publik dan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Bagi pemerintah kabupaten, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang *good governance*.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kompetensi aparatur pemerintah

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria yang digunakan. Nadler sebagai orang yang pertama kali mencetuskan istilah *Human Resource Development (HRD)* tahun 1969 dalam Samsudian (2005), membedakan antara pengertian *Training*, *Education*, dan *Development* sebagai berikut : **Training** : *learning to present job*. **Education** : *learning to prepare the individual for a different but identified job*. **Development** : *learning for growth of the individual but not related to a specific present or future job*.

### Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas, dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang *agent* untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006 : 83). *Governmental Accounting Standards Board* dalam Mardiasmo (2006) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

### Motivasi

Dua faktor mengenai motivasi yang dikembangkan Herzberg adalah faktor yang membuat individu merasa tidak puas (*dissatisfied*) dan faktor yang membuat individu merasa puas (*satisfied*). Kesimpulan khusus yang dihasilkan Herzberg

dari penelitiannya yaitu: *Pertama*, terdapat serangkaian kondisi ekstrinsik, keadaan pekerjaan yang menyebabkan rasa tidak puas di antara para bawahan apabila kondisi tersebut tidak ada. Kondisi tersebut adalah faktor-faktor yang membuat individu merasa tidak puas karena faktor-faktor tersebut diperlukan untuk mempertahankan hierarki yang paling rendah, yaitu tingkat tidak adanya ketidakpuasan. *Kedua*, serangkaian kondisi instrinsik kepuasan pekerjaan yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat sehingga dapat menghasilkan kinerja pekerjaan yang baik. Apabila kondisi tersebut tidak ada, kondisi tersebut ternyata tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Serangkaian faktor tersebut disebut *satisfied*.

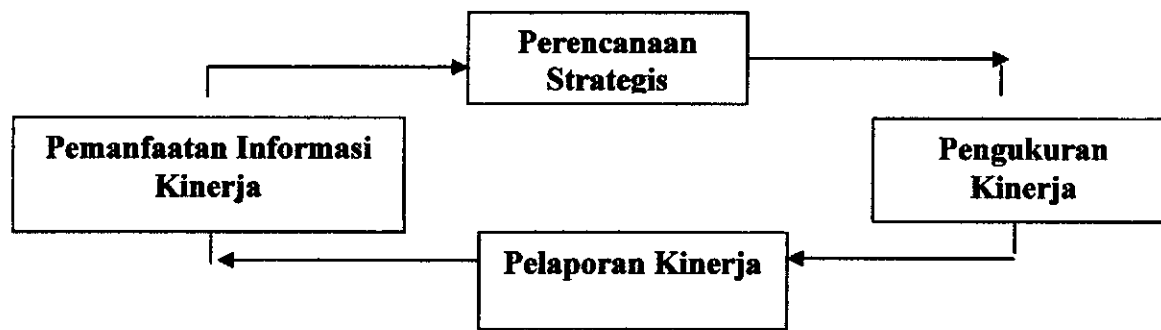
### **Ketaatan pada Peraturan Perundangan**

Akuntansi dan kaitannya dengan hukum ini telah dikemukakan oleh Choi dalam Soleman (2007) dalam pandangannya mengenai akuntansi dengan lingkungannya. Menurutnya terdapat delapan elemen lingkungan yang mempengaruhi akuntansi yaitu sistem akuntansi, sumber pendanaan, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Choi juga menambahkan bahwa ada pengaruh hukum dan perkembangan akuntansi. Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan suatu paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik Indonesia. diantaranya PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita suatu bangsa. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Akuntabilitas kinerja merupakan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program, mengukur hasilnya atau hasil dibandingkan dengan standarnya. Sistem akuntabilitas kinerja menyediakan kerangka kerja untuk mengukur hasil dan mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan secara efektif oleh pemimpin-pemimpin politik, pengambil keputusan dan manajer program. Sistem ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan manajer program, dan juga berguna bagi penyedia program, konsumen, dan publik. Akuntabilitas terfokus pada hasil dari suatu kegiatan. Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber : Pusdiklatwas BPKP 2007

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris (Indriantoro, 2002). Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis dan literatur.

- H<sub>1</sub> : Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H<sub>2</sub> : Penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H<sub>3</sub> : Motivasi kerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H<sub>4</sub> : Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Sampel dan Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel nonprobabilitas dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yang dilakukan dengan pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Bambang, 2002:131). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 47 unit. Responden adalah kepala satuan kerja, bagian keuangan dan bagian perencanaan/program. Karena jumlah populasi tidak mencapai 100 responden, maka yang menjadi sampel penelitian adalah semua responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisi pertanyaan kepada Instansi terkait. Data-data primer diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi dengan pihak berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

**Pengukuran Variabel**

Terdapat empat variabel utama dalam model penelitian, yaitu variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X<sub>1</sub>), penerapan akuntabilitas keuangan (X<sub>2</sub>), motivasi kerja (X<sub>3</sub>), dan ketaatan pada peraturan perundangan (X<sub>4</sub>), yang merupakan kelompok variabel independen (variabel bebas) dalam model, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) sebagai variabel dependen (variabel terikat). Pengukuran variabel independen dan dependen masing-masing menggunakan skala *Likert* dengan skala penilaian (skor) 1 sampai dengan 5. Dimana, masing-masing variabel diberi daftar pertanyaan yang diambil dari kuesioner Soleman (2007) dan Ma'arifah (2004) yang dibuatnya sendiri. Kemudian, masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban ekstrim negatif dan nilai 5 untuk jawaban ekstrim positif. Untuk menguji reabilitas dipergunakan *Alpha Cronbach* yang dianggap paling sesuai untuk pengujian terhadap item-item penelitian yang memiliki skor 1-5.

Rumus *Alpha Cronbach* adalah:

$$\alpha = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

*k* = jumlah item yang diuji  
*S<sub>t</sub><sup>2</sup>* = variance of total test scores

$\sum$  = jumlah semua item yang diuji  
*S<sub>i</sub><sup>2</sup>* = variance of raw score

Rumus Variance :

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}$$

*x* = rawscore  
 $\bar{x}$  = mean

*N* = number of raw score

**Pengujian Hipotesis**

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Y= Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

- b<sub>0</sub>* = Konstanta
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>* = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub>* = Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
- X<sub>2</sub>* = Penerapan Akuntabilitas Keuangan
- X<sub>3</sub>* = Motivasi Kerja
- X<sub>4</sub>* = Ketaatan pada peraturan perundangan
- e* = Variabel error (pengganggu)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Lingkup penelitian difokuskan pada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hulu yaitu berjumlah 47 satuan kerja. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis hubungan variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mengkaji hal tersebut, dilakukan penelitian terhadap pejabat setingkat Bupati, Wakil Bupati, serta staf yang berhubungan dengan kompetensi aparatur pemerintah daerah, serta Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan sejumlah eselon III. Dari 47 satuan kerja yang telah dikirimkan kuesioner sebanyak 141 buah, yang kembali sebanyak 99 buah (70%), sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 42 buah (30%). Setelah dilakukan pemeriksaan, semua kuesioner yang kembali terisi dengan lengkap, sehingga kuesioner layak dianalisis. 70% respon yang diberikan responden termasuk tinggi, karena tingkat respon di Indonesia terutama untuk penelitian yang menggunakan *mail survey* berkisar antara 10%-20%. Jika menggunakan rumus Slovin (1960) untuk jumlah responden yang diteliti adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{141}{1 + 141(0,1)^2} = 59 \text{ responden}$$

n = jumlah sampel/responden penelitian

N = Jumlah populasi secara keseluruhan

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (10 %)

Berdasarkan rumus diatas, jumlah responden dalam penelitian ini mencukupi batas minimal jumlah responden yang layak diteliti. Dengan pengembalian 70% (99 kuesioner), maka peneliti menganggap sudah layak untuk dilakukan pengolahan data.

### 2. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, dibuat menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu **tinggi**, **sedang**, dan **rendah**. Semua variabel penelitian diukur dalam skala ordinal, kriteria pengkategorian dilakukan atas nilai relatif dari total skor jawaban responden terhadap nilai skor standar. Berdasarkan tabel D.I tersebut bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah memiliki rata – rata jawaban responden adalah 25.84 dengan standard deviasi sebesar 2.951. Nilai rata – rata jawaban untuk Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah adalah sebesar 51.28 dengan standard deviasi sebesar 7.998. Untuk Penerapan Akuntabilitas Keuangan, memiliki nilai rata – rata jawaban responden sebesar 24.46 dengan standard deviasi sebesar 4.862. Nilai rata – rata jawaban untuk Motivasi Kerja adalah sebesar 63.05 dengan standard deviasi sebesar 5.679. Sedangkan untuk Ketaatan

pada Peraturan Perundangan memiliki nilai rata – rata jawaban responden sebesar 45.59 dengan standard deviasi sebesar 5.713.

**Table I Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
AKIP	25.84	2.951	99
KPTSI	51.28	7.998	99
AKT.KEU	24.46	4.862	99
MOTIVASI	63.05	5.679	99
KETAATAN	45.59	5.713	99

Sumber : Pengolahan Data Penelitian

### 3. Metode Analisis Data

#### A. Uji Validitas

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terdiri dari 19 pertanyaan. Koefisien korelasi 0.289-0.671, dengan signifikansi 0.05. Hasil tersebut mendekati angka +1. Penerapan Akuntabilitas Keuangan terdiri dari 6 pertanyaan. Koefisien korelasi antara 0.645-0.822, dengan signifikansi 0.05. Hasil kedua variabel tersebut mendekati angka +1 dan disimpulkan setiap pertanyaan pada instrumen ini adalah valid dan setiap butir pertanyaan memiliki korelasi yang positif dengan skor totalnya. Motivasi Kerja yang berjumlah 23 pertanyaan, koefisien korelasi antara 0.116-0.533 dengan signifikansi 0.05. Dari hasil perhitungan korelasi setiap butir pertanyaan, 5 buah pertanyaan dinyatakan tidak valid, yaitu 5, 6, 15, 18 dan 19, sehingga kelima pertanyaan ini harus dibuang. Berikutnya dilakukan dua kali pengujian instrumen yang valid, sehingga menghasilkan skor total yang berkisar antara 0.275-0.598. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen ini telah valid dan memiliki korelasi yang positif terhadap skor totalnya dengan signifikansi 0.05. Instrumen Ketaatan pada Peraturan Perundangan terdiri dari 11 pertanyaan. Koefisien korelasi skor total berkisar antara 0.445-0.789 dengan signifikansi 0.05. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari 7 pertanyaan. Koefisien korelasi antara 0.591 – 0.932 dengan signifikansi 0.05. Hasil perhitungan korelasi kedua variabel tersebut mendekati angka +1 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan adalah valid dan memiliki korelasi yang positif dengan skor totalnya. Dari hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan sbahwa setiap butir pertanyaan pada kuesioner untuk setiap variabel adalah valid.

#### B. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.60 (Ghozali, 2005). Hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II Hasil Uji Reliabilitas

Faktor Individual	Jumlah Item	Koefisien Cronbach Alpha
Kompetensi Aparatur Pemda	19	0.871
Penerapan Akuntabilitas Keuangan	6	0.863
Motivasi Kerja	17	0.616
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	11	0.852
AKIP	7	0.836

Sumber : Pengolahan Data Penelitian

C. Uji Asumsi Klasik

1. Multikolinearitas

Nilai Toleransi dan VIF. Suatu model regresi dikatakan bebas multikolinieritas apabila memiliki nilai VIF <10 atau cenderung mendekati 1 atau tolerance >0,1 hasil pengujian dapat dilihat pada table DIII.

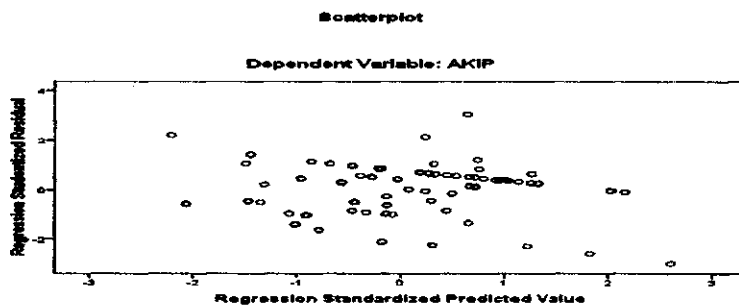
2. Uji Autokorelasi

Statistik *Durbin Waston* digunakan untuk menguji autokorelasi pada penelitian ini. Ghazali (2005) mengatakan bahwa keputusan ada tidak adanya autokorelasi dapat dilihat dari hasil SPSS diperoleh angka D-W sebesar 2.170 Tidak ada autokorelasi jika  $Du < d < 4-du$ , yaitu :  $1.642 < 2.170 < 2.358$  Nilai Du didapat dari tabel Durbin Watson dengan k (jumlah variabel independen) adalah 5 dan n (jumlah sampel) adalah 99. Maka didapat  $Du = 1,642$ . Oleh karena nilai durbin Watson berada diantara nilai Du dan nilai 4-du maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Heteroskedastisitas

Adanya heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan *scatterplot* Jika titik plots menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar D.I Gambar Pendistribusian Data



Sumber : Pengolahan Data Penelitian

4. Normalitas

Pengujian normalitas dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika data menyebarkan disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebarkan jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Santoso 2007;214). *Normal probability plot* pada penelitian ini tampak data mengikuti garis diagonal, Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1.187 dan signifikan pada 0.119, ini berarti bahwa data residual berdistribusi normal.

5. Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis digunakan analisis regresi berganda, dengan Model :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Tabel III Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.468	3.573		3.490	.001		
KPTSI	.018	.043	.049	.418	.677	.673	1.486
AKT.KEU	-.054	.079	-.088	-.678	.500	.540	1.853
MOTIVASI	.108	.054	.209	2.023	.046	.859	1.164
KETAATAN	.152	.060	.294	2.536	.013	.679	1.472

a. Dependent Variable: AKIP

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Koefisien regresi variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar 0.018 dengan signifikansi *p* sebesar 0.677 (*p*>0.05). Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap AKIP. Nilai *t*<sub>hitung</sub> < *t*<sub>tabel</sub>, apabila *t*<sub>hitung</sub> < *t*<sub>tabel</sub> maka H1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanti (2008). Namun berlawanan dengan penelitian Soleman (2007) hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap AKIP. Pendidikan aparatur pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya sarjana (S1). Namun ruang lingkup pekerjaan tidak sesuai. Sehingga membuat kompetensi aparatur pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2. Pengujian Hipotesis Kedua

Koefisien regresi variabel penerapan akuntabilitas keuangan sebesar  $-0.054$  dengan signifikansi  $p$  sebesar  $0.500$  ( $p > 0.05$ ) Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan memiliki pengaruh negatif dengan AKIP. Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_2$  ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri (2008). Namun, hasil penelitian ini tidak sama dengan Garnita (2008) bahwa akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Dan juga penelitian Soleman (2007) yang menguji pengaruh penerapan akuntabilitas terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berpengaruh sangat signifikan terhadap AKIP.

## 3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Koefisien regresi sebesar  $0.108$  dengan signifikansi  $p$  sebesar  $0.046$  ( $p < 0.05$ ). Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap AKIP. Dari hasil diatas dapat kita lihat bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_3$  diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan Narmodo dan Wajdi (2006) yang meneliti kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.

## 4. Pengujian Hipotesis Keempat

Koefisien regresi sebesar  $0.152$  dengan signifikansi  $p$  sebesar  $0.013$  ( $p < 0.05$ ). Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh terhadap AKIP. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_4$  diterima. Dari hasil diatas, dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh yang kuat variabel ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebuah penelitian Chairullah (2004) yang menguji pengaruh ketaatan, kerjasama dan prakarsa terhadap kinerja menghasilkan pengujian variabel – variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya Hipotesis ini diperkuat oleh Soleman (2007) dalam penelitiannya yang menghasilkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas telah memberikan hasil yang baik. Begitu juga dengan semua uji asumsi klasik yang diperoleh menunjukkan bahwa normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi

data dalam penelitian ini berdistribusi normal, semua model terbebas dari autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

- b. Pengujian terhadap hipotesis terhadap 4 variabel hanya satu variabel ketaatan yang berpengaruh signifikan terhadap AKIP, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan.
- c. Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,376 menunjukkan pengaruh yang rendah antara variabel independen dan variabel dependen. Besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0.105 yang berarti 10.5% variasi AKIP dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundangan. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artjana, I Gde, 2004. Upaya membangun Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance: Tantangan Harapan.
- BPKP, 2007, Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik, suatu pengantar, Jakarta Erlangga.
- BPKP. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu.
- Efendi, Taufiq,2007. Agendra strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance.
- Ghozali, Imam. 2005, Aplikasi Analisis Multivariance dengan program SPSS. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Mur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta: BPF.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi. Struktur, Desain & Aplikasi. Prentice Hall International, Inc. ACAN-Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan